

KEBIJAKAN MONETER

Kenaikan BI Rate Perkuat Stabilitas

JAKARTA, KOMPAS — Keputusan Bank Indonesia menaikkan suku bunga acuan menjadi 6,25 persen untuk memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah, tetapi kemungkinan menekan laju pertumbuhan ekonomi. Kenaikan itu akan memicu kenaikan suku bunga kredit sehingga masyarakat yang daya belinya belum pulih bakal kembali tertekan.

Bank Indonesia (BI), Rabu (24/4/2024), menaikkan suku bunga acuan (BI Rate) sebesar 25 basis poin (bps) menjadi 6,25 persen. Keputusan tersebut diambil setelah BI mempertahankan BI Rate sebesar 6 persen selama lima bulan berturut-turut sejak kenaikan terakhirnya 25 bps pada Oktober 2023.

Gubernur BI Perry Warjiyo sesuai Rapat Dewan Gubernur BI Rabu mengatakan, kenaikan suku bunga tersebut untuk memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah dari dampak memburuknya risiko global serta sebagai langkah *pre-emptive* (pencegahan dini) dan *forward looking* (antisipasi ke depan) untuk memastikan inflasi tetap dalam sasaran 2,5 plus minus 1 persen pada 2024 dan 2025, sejalan dengan sikap/pendirian (*stance*) kebijakan moneter yang pro stabilitas.

Senior Economist PT Samuel Sekuritas Indonesia Fithra Faisal Hastiadi saat dihubungi berpendapat, kenaikan BI Rate akan membawa dampak terhadap perekonomian nasional. Dengan kata lain, proyeksi pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5 persen tidak akan terwujud dan diperkirakan hanya sekitar 4,8 persen.

(Bersambung ke hlm 15 kol 1-2)

Kenaikan BI Rate

(Sambungan dari halaman 1)

Menurut Fithra, kebijakan moneter suku bunga yang ditempuh guna menjaga stabilitas nilai tukar rupiah akan mengorbankan pertumbuhan ekonomi.

Dalam rangka menjaga momentum pertumbuhan, kata Fithra, pemerintah perlu mengidentifikasi sektor-sektor mana saja yang akan terdampak atau sensitif terhadap kenaikan suku bunga acuan, terutama sektor riil. Beberapa sektor tersebut, antara lain, infrastruktur, penjualan otomotif, serta ritel.

"Dibutuhkan *counter policy* dari sisi fiskal saat ada kebijakan moneter seperti ini. Sektor UMKM (usaha mikro, kecil, dan menengah), misalnya, jangan sampai kenaikan suku bunga ini mengakibatkan gagal bayar meningkat sehingga rasio NPL perbankan turut meningkat," ujarnya.

Ekonom Sustainable Development Indonesia (SDI) Dradjad Wibowo mengatakan, sebenarnya belum ada urgensi bagi BI untuk menaikkan BI Rate. Alasannya, fluktuasi rupiah masih bisa dikelola dengan operasi pasar yang terukur.

"Jadi kenaikan ini hemat saya terlalu dini. Khawatirnya, alih-alih menenangkan pasar, para spekulasi justru melihat langkah BI ini sebagai pemicu berspekulasi lebih lanjut. Efeknya, risiko *overshooting* meningkat. Intinya, otoritas moneter dan fiskal harus tenang, mengambil langkah dengan terukur, *timing*-nya harus pas," kata Dradjad.

Dunia usaha kecewa

Sejumlah pengusaha kecewa dengan langkah BI yang terburu-buru menaikkan BI Rate.

Wakil Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Bidang Kemaritiman, Investasi, dan Luar Negeri Shinta W Kamdani mengatakan, kebijakan tersebut tidak ideal bagi pelaku usaha. "Kebijakan ini tidak ideal bagi pelaku usaha karena berpotensi semakin menambah beban dan melemahkan kinerja usaha," katanya Rabu.

Kenaikan BI Rate, lanjutnya, akan diikuti peningkatan bunga kredit perbankan dan lembaga pembiayaan lainnya. Hal ini bi-

sa menekan permintaan kredit dari dunia usaha lantaran bunga kredit kian mahal. Ini juga membuat suku bunga kredit di Indonesia menjadi tidak kompetitif dibandingkan negara lain di kawasan.

Menurut Shinta, kebijakan menaikkan BI Rate seharusnya menjadi upaya terakhir dan sebaiknya tidak dilakukan terlalu sering. "Sebisanya mungkin beban-beban kegiatan usaha itu diringankan agar kian efisien, bukan malah ditambahkan," ujar Shinta.

Analisis Kebijakan Ekonomi Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Ajib Hamdani, mengatakan, kenaikan BI Rate menjadi disinsentif bagi dunia usaha dan perekonomian Indonesia. Dengan kebijakan moneter yang cukup agresif ini, setidaknya ada tiga hal yang akan menjadi tantangan.

Pertama, perbankan cenderung menaikkan suku bunga kredit sehingga sektor usaha akan mengalami kenaikan beban biaya. Kedua, melemahkan daya beli masyarakat. Ketiga, perlambatan ekonomi.

Upaya BI

Gubernur Perry Warjiyo mengatakan, meskipun kebijakan moneter mengarah pada stabilitas (*pro-stability*), BI turut menerapkan kebijakan makroprudensial dan sistem pembayaran yang mendukung pertumbuhan ekonomi (*pro-growth*). Salah satunya melalui Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM).

Perry menjelaskan, penguatan KLM dilakukan dengan mengoptimalkan insentif likuiditas yang tersedia dan memperluas cakupan sektor prioritas yang berkontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Penguatan KLM diarahkan dapat segera memberikan tambahan likuiditas perbankan sebesar Rp 81 triliun sehingga total insentif menjadi Rp 246 triliun.

"Sejalan dengan pertumbuhan kredit yang terus meningkat, tambahan likuiditas dari KLM diperkirakan dapat mencapai Rp 115 triliun pada akhir 2024 sehingga total insentif yang diberikan menjadi Rp 280 triliun," katanya. (AGP/BKY)